



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 22 Maret 2021

Halaman: 9

Kejati Sita Dokumen Bukti Kredit Fiktif Bank Jogja

YOGYA, TRIBUN - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengembangkan kasus dugaan pemberian kredit fiktif oleh Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja terhadap PT Indonusa Telemedia (Transvision). Tim Kejati telah menyita beberapa dokumen dari kedua belah pihak untuk didalami sekaligus sebagai barang bukti awal dalam pengusutan kasus tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIY Mohammad Fatin menjelaskan, proses penyidikan terus berlanjut sampai saat ini. "Sudah ada beberapa dokumen yang kami sita, dan kemungkinan akan dijadikan barang bukti, setelah penyidikan yang kami lakukan kemarin," katanya kepada *Tribun Jogja*, Minggu (21/3).

Fatin masih belum merinci dokumen yang dimaksud apakah berkaitan dengan berkas pembukuan atau berkas transaksi kredit yang diberikan.

● ke halaman 15

KPK Dalam Penyusunan

● Sambungan Hal 9

"Ya intinya dokumen terkait dua perusahaan itu. Lebih jelasnya nanti hari Selasa kami sampaikan," singkatnya.

Diberitakan *Tribun Jogja* sebelumnya, pihak Kejati DIY telah menaikkan status penyidikan dugaan pemberian kredit fiktif oleh Bank Jogja terhadap Transvision ke status penyidikan sejak Jumat (19/3) lalu.

Bukan kesalahan

Kalangan legislatif Kota Yogyakarta memandang, polemik

tersebut, bukan sepenuhnya kesalahan Bank Jogja. Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menyampaikan, berdasar pengetahuannya, pihak Bank Jogja sejatinya sudah menerapkan standar operasional prosedur (SOP), saat mencairkan kredit itu.

"Waktu kami melakukan komunikasi secara non formal dan melibatkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bahwa semua SOP yang kaitannya dengan perkreditan itu, sudah dilakukan," terangnya, dikonfirmasi.

Tapi, secara formal, belum. Soalnya sejak awal kan sudah masuk proses hukum,

sehingga tidak etis, ya, kalau secara politik mencampuri urusan," lanjut Fokki.

Ja pun mengungkapkan, polemik seperti ini, ternyata tidak hanya menimpa Bank Jogja saja. Sebab, dirinya memperoleh informasi, terdapat bank-bank lain, termasuk di luar Yogyakarta, yang tersandung kejadian nahas serupa. Karena itu, ia berujar, pelakunya layak disebut sindikat.

"Setahu saya yang tertimpa masalah ini bukan Bank Jogja saja. Tapi, juga menimpa salah satu bank swasta, serta bank milik pemerintah daerah lain. Kalau saya melihat, itu sindikat yang terorganisir. Nah, itu menjadi tantangan

APH, untuk mengungkapnya," jelas politisi PDI-P itu.

Fokki berujar, lantaran kini Kejati DIY tengah menepuh penyelidikan pada kasus dugaan kredit fiktif tersebut, maka semua pihak diharapkan bisa menghormati proses hukum. Bahkan, diharapkannya pula, Kejati bisa membongkar polemik ini sampai ke akar permasalahan.

"Karena itu sudah masuk ranah hukum, ya biarkan proses hukum itu berjalan dengan semestinya. Harapan kami, itu bukan hanya yang di atas permukaan, tapi yang di bawah juga harus ditungkap," pungkasnya. (hda/aka)

5. ☐ Disa ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005